

**AKTUALISASI PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR  
INTERNAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  
DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH :**

**NAMA : ALYA WIARY RAMADHANI**  
**NPM : 2205170030**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PEMERIKSAAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**

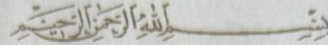
**2026**



**MSU**  
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : ALYA WIARY RAMADHANI  
NPM : 2205170030  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN  
Judul Tugas Akhir : AKTUALISASI PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNG BALAI.

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Dr. HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

**Penguji II**

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si.)

**Pembimbing**

(Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, SE., Ak., M.Si., CA.)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(Dr. RADIMAN, S.E., M.Si.)

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ALYA WIARY RAMADHANI  
N P M : 2205170030  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN  
Judul Skripsi : AKTUALISASI PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI  
AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN  
AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  
TANJUNGBALAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
Tugas Akhir.

Medan, Maret 2026

Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., Ak., M.Si., CA

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Mhd. Shareza Hafiz, SE., M.Acc



Dekan, S.E., M.Si



majelis PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Alya Wiary Ramadhani  
NPM : 2205170030  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan  
Judul Tugas Akhir : Aktualisasi Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	OK		
Bab 2	OK		
Bab 3	OK		
Bab 4	Partisi di tambahkan pengantar pada Hasil Penelitian & Pembahasan	28/2-2024	
Bab 5	Kesimpulan & Saran	6/3-2024	
Daftar Pustaka	Guanah Mendley	7/3-2024	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc, Sidy Meji Hiza	09/3-2024	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

M. SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc

Medan, Februari 2026  
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id/> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Alya Wiary Ramadhani  
NPM : 2205170030  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan  
Judul Penelitian : Aktualisasi Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 31 Maret 2026  
Saya yang Menyatakan



Alya Wiary Ramadhani

## ABSTRAK

### **AKTUALISASI PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**

**ALYA WIARY RAMADHANI**  
**Program Studi Akuntansi**  
**Email : [alyawiary323@gmail.com](mailto:alyawiary323@gmail.com)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kelemahan sistem pengendalian internal, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan, serta temuan berulang dari BPK yang berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait di Inspektorat Kota Tanjungbalai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat telah menjalankan perannya sebagai auditor internal melalui fungsi audit, revidi, evaluasi, dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Peran tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Inspektorat sebagai auditor internal berjalan baik dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah di daerah Kota Tanjungbalai.

**Kata Kunci:** Inspektorat, Audit Internal, Akuntabilitas, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Daerah

## **ABSTRACT**

### **ACTUALIZING THE INSPECTORATE'S ROLE AS AN INTERNAL AUDITOR IN IMPROVING THE ACCOUNTABILITY AND EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE TANJUNGBALAI CITY LOCAL GOVERNMENT**

**ALYA WIARY RAMADHANI**  
**Program Studi Akuntansi**  
**Email : [alyawiary323@gmail.com](mailto:alyawiary323@gmail.com)**

*This study aims to analyze the actualization of the Inspectorate's role as an internal auditor in improving the accountability and effectiveness of financial management in the Tanjungbalai City Regional Government. The background of this study is based on the continued discovery of various problems in regional financial management, such as weaknesses in the internal control system, low compliance with regulations, and repeated findings from the Supreme Audit Agency (BPK) that impact the quality of regional financial reports. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of related parties in the Tanjungbalai City Inspectorate. The results of the study indicate that the Inspectorate has attempted to become an internal auditor through audit, review, evaluation, and monitoring functions of regional financial management. This role contributes to improving the accountability and effectiveness of financial management from Fair with Exceptions (WDP) to Fair Without Exceptions (WTP). The conclusion of this study indicates that the Inspectorate's role as an internal auditor is functioning well in improving the accountability and effectiveness of government financial management in the Tanjungbalai City region.*

**Keywords:** *Inspectorate, Internal Audit, Accountability, Effectiveness, Regional Financial Management*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**Aktualisasi Peranan Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai**" dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Pertama-tama dan yang paling utama penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orang Tua saya **Bapak Aipda Hari Murianto, S.H dan Ibu Wiwi Fitria, SH, MAP** yang telah memberikan kasih sayang, perhatian baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis. Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Radiman, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S.E M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak M. Firza Alpi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Prof.Dr.Hj.Maya Sari, SE., Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing yang memberikan ilmu bimbingan, dan masukan serta pengarahan kepada saya.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Bapak/ ibu staff kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Medan
11. Sahabat-sahabat saya Kayla Bintang Ramadanty, Emi Armila Zaura, Farah Fatin Adani, Nabila Fathira Simamora, Nazwa Salsabila, dan Agustian R yang telah mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini belum sempurna baik peneliti maupun isi karena keterbatasan kemampuan peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2026  
Penulis

Alya Wiary Ramadhani  
2205170030

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1. Audit Internal .....	12
2.1.1.1 Pengertian Audit Internal.....	12
2.1.1.2 Peran Inspektorat Sebagai Auditor Internal Perusahaan...13	
2.1.1.3 Standar Profesi Auditor Internal .....	16
2.1.1.4 Tahap-Tahap Audit Internal .....	18
2.1.2 Indikator Kualitas Audit Pemerintahan .....	20
2.1.3 Review atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Berpikir .....	31
2.3.1 Inspektorat Kota Tanjungbalai.....	31
2.3.2 Audit Internal .....	32
2.3.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai .....	33
2.3.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	36

3.2 Definisi Variabel.....	37
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.2 Pembahasan .....	60
4.2.1 Peranan Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Laporan Keuangan.....	60
4.2.2 Faktor Penghambat yang Dihadapi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Laporan Keuangan.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2022-2024 ..5	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....27	
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian .....38	
Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data .....43	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	34
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan Peranan Inspektorat (APIP) di Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, dan efisien.

Dalam rangka memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, keberadaan Inspektorat menjadi sangat strategis. Inspektorat berfungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Peran auditor internal daerah ini tidak hanya sebatas pemeriksaan, namun juga memberikan keyakinan yang memadai, serta konsultasi guna mendorong peningkatan tata kelola serta pengendalian internal pemerintah daerah.

Namun, pada praktiknya, peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya optimal. Di beberapa daerah, termasuk Kota Tanjung Balai, masih ditemukan berbagai permasalahan mulai dari rendahnya kualitas laporan keuangan, lemahnya pengendalian internal, hingga temuan pemeriksaan dari BPK yang berulang dari tahun ke tahun. Kondisi ini

menandakan bahwa fungsi Inspektorat dalam menjalankan perannya sebagai auditor internal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompetensi auditor, hingga minimnya tindak lanjut hasil pengawasan.

Kota Tanjung Balai sebagai bagian dari pemerintahan daerah juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif. Peran Inspektorat Kota Tanjung Balai menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban berjalan sesuai peraturan dan menghasilkan nilai tambah bagi kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana aktualisasi peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan di Kota Tanjung Balai.

Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Tugas lain dari inspektorat sendiri ialah diharapkan mampu melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan SAP sebelum disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Inspektorat daerah mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, inspektorat atau nama lain

yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien (Maulana, 2021).

Maka dari itu Inspektorat merupakan hal utama dan penting dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Peran inspektorat sebagai audit internal pemerintah juga tidak terbatas pada pengawasan tetapi juga pembinaan/konsultasi disamping melakukan *review*. (Ihsan,2018). Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu: perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Kemudian, inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan kendala informasi yang disajikan (Sunarsih et al., 2021).

Dalam praktiknya, laporan keuangan pemda di Kota Tanjungbalai masih mendapat banyak temuan dari tahun ke tahun, tetapi rekomendasi Inspektorat tidak segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah tersebut, bahkan ada rekomendasi yang berulang setiap tahun. Menurut teori pengawasan internal,

fungsi audit internal bertujuan memberikan *assurance* dan perbaikan berkelanjutan. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, maka fungsinya menjadi tidak efektif dan efisien. Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pengawasan internal harus mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena menuntut APIP mampu melakukan evaluasi secara profesional.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa karakteristik kuantitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kuantitatif laporan keuangan ini meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang akuntabel dan efektif adalah laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang dimana opini WTP diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu SAP, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas (Sunarsih et al., 2021).

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2022-2024**

<b>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Tahun</b>	<b>Opini Audit</b>	<b>Temuan (Keterangan)</b>
2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan : 1. Adanya kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan berdampak pada lebih saji asset jalan dan irigasi 2. Adanya indicator Kesalahan dalam pengamanan asset tetap dan asset lain-lain,adanya sengketa tanah yang belum bersertifikat
2023	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Masih terdapat kelemahan dalam SPI,kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan masalah dalam pengumpulan dokumen atau keterlambatan waktu 1.Terdapat asset tetap yang tidak dapat keyakinan terhadap keberadaan asset
		peralatan dan mesin 2.Adanya permasalahan dalam belanja modal jalan Dan irigasi merupakan kelebihan bayar

2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Inspektorat membantu daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena mereka melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan, Inspektorat melakukan perbaikan berdasarkan tahun 2022 dan 2023 WDP, Inspektorat menelaah apakah laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung bukti yang memadai, serta bebas dari salah saji material. Upaya ini memastikan bahwa data yang diserahkan kepada BPK sudah akurat dan berkualitas.
------	--------------------------------	---

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai (2022-2024)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kota Tanjung balai dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, disebutkan bahwa masih ditemukan kesalahan administrasi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, dan kelemahan pelaporan keuangan daerah. Tidak sesuai dengan teori akuntabilitas publik yang mana mengatakan pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat waktu. Bagaimana yang sudah diatur dalam PP No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan disebutkan juga pada data tahun 2022 pemerintahan kota tanjung balai mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, begitu pula pada tahun 2023 pemerintahan kota Tanjungbalai masih mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Selama dua tahun tersebut pemerintahan kota Tanjung balai masih belum mendapatkan opini yang terbaik berupa wajar dengan pengecualian dalam kualitas laporan keuangannya, adanya instansi yang masih telat waktu dalam pengumpulan laporan keuangan, instansi ini biasanya instansi besar seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, dan PU ini juga disebabkan besarnya aset aset di dinas tersebut. Dimana pada tahun 2024 berusaha harus mengalami kemajuan yang dimana pemerintahan kota Tanjung balai akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dapat diketahui bahwa Inspektorat kota Tanjung balai merubah tata cara pengawasannya, mulai dari mereviu laporan keuangan secara paralel, untuk aset dan pendapatan agar di rekonsiliasi setiap bulan, hingga menerapkan pengawasan yang lebih baik lagi, rekomendasinya harus ditindak lanjuti secara berkala, sehingga akhirnya mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penilaian tertinggi dalam kualitas laporan keuangan. Opini ini diberikan BPK bukan untuk Inspektorat tapi untuk hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai atas hasil pemeriksaan yang telah mereka lakukan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Penelitian ini menganalisis perbedaan peranan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena berdasarkan hasil audit yang diperiksa oleh BPK terdapat perbedaan

pendapat dalam opini yang diberikan yang berupa semula mendapatkan WDP di tahun 2022,2023 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi opini WTP sehingga terdapat pula perbedaan peranan yang dilakukan Badan Inspektorat Kota Tanjung balai, berdasarkan perbedaan hasil audit laporan keuangan itulah peneliti tertarik untuk melihat perbedaan seperti apa yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai sehingga laporan keuangan yang diperiksa dapat mengalami peningkatan kualitas yang lebih baik berupa mendapat opini WTP pada tahun 2024. Karena berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri disebutkan bahwa inspektorat melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit, review, evaluasi, dan pemantauan yang berkaitan langsung dengan penjamin kualitas laporan keuangan. Karena BPK tidak mau memeriksa laporan keuangan yang belum ada Surat Keterangan Telah Di Audit oleh Inspektorat. Tetapi tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan Pemerintah Kota, melainkan hanya bertugas mengawasi dan membina.

Sehingga dalam hal ini peneliti ingin menganalisis lebih dalam apakah dalam praktiknya Inspektorat kota Tanjungbalai andil dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena Inspektoratlah yang memeriksa sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menyempurnakan laporan keuangan daerah dengan memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang seharusnya dilakukan pada laporan keuangan daerah. Adanya internal audit selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis perbedaan peranan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena berdasarkan hasil audit laporan keuangan terdapat peningkatan opini yang diberikan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai diharapkan melaksanakan fungsi evaluasi, rekomendasi, dan pengawasan pada laporan keuangan sehingga dapat diperiksa oleh BPK agar mendapatkan laporan keuangan daerah kualitas yang baik dan memiliki kewajaran laporan keuangan daerah, maka dari itu penelitian ini diberi judul: " Aktualisasi Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas,masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan Inspektorat belum sepenuhnya optimal, masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya terpenuhi, yang terlihat dari temuan berulang BPK dalam laporan keuangan, adanya kesalahan dalam pengamanan dan pencatatan aset tetap.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi auditor serta rendahnya kepatuhan OPD dan koordinasi antar perangkat daerah sehingga pengawasan internal dinilai belum cukup maksimal.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana aktualisasi peranan Badan Inspektorat Kota Tanjung balai sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungbalai?
3. Apa saja faktor yang menjadi kendala bagi Inspektorat dalam menjalankan perannya sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungbalai?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan pada penelitian ini:

1. Untuk menganalisis aktualisasi peranan Badan Inspektorat Kota Tanjungbalai sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Inspektorat dalam menjalankan perannya sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait aktualisasi peran auditor internal pemerintah daerah dalam mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

## **2. Manfaat Praktis bagi Inspektorat Kota Tanjungbalai**

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana peran Inspektorat sebagai auditor internal telah diaktualisasikan dalam proses pengawasan, audit, dan pembinaan pada perangkat daerah. Hasil penelitian dapat menjadi evaluasi internal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta aspek yang perlu ditingkatkan guna memperkuat peran Inspektorat dalam memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan.

## **3. Manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai**

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya melalui optimalisasi peran pengawasan internal. Rekomendasi penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sehingga mampu meningkatkan efektivitas program serta mendorong terciptanya akuntabilitas publik yang lebih baik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Audit Internal**

###### **2.1.1.1 Pengertian Audit Internal**

Pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat, kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2019)

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Audit internal bisa sebagai pendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi dan peningkatan efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (Tuanakotta, 2019:02).

Menurut Agoes (2022) internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Dari penjelasan oleh para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa audit internal adalah proses penilaian independen yang telah dirancang dalam suatu

perusahaan dengan tujuan untuk memeriksa, menilai, mengevaluasi dan mereview hasil laporan keuangan yang objektif guna untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola keuangan.

#### **2.1.1.2 Peran Inspektorat Sebagai Auditor Internal Perusahaan**

Peranan audit internal adalah untuk memberikan nilai tambah pada organisasi melalui fungsi asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif, guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola yang baik. Ahli juga menyoroti peranannya dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan serta meningkatkan efisiensi operasional melalui evaluasi yang sistematis. Inspektorat adalah lembaga pengawasan internal yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintah atau organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, efektivitas, dan akuntabilitas. Inspektorat merupakan lembaga pengawasan internal di lingkungan pemerintahan yang memiliki tugas utama untuk memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai auditor internal pemerintahan, inspektorat memiliki berbagai peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Rahman, 2020).

Berikut adalah beberapa peranan utama inspektorat :

##### **1. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**

Inspektorat memiliki peran utama sebagai pengawas internal yang memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui fungsi audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan, Inspektorat menilai apakah proses pengelolaan

keuangan dan pelaksanaan kegiatan sudah efektif, efisien, dan taat aturan. Peranan ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, sekaligus memastikan bahwa setiap perangkat daerah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab sesuai standar yang ditetapkan.

## **2. Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Inspektorat berperan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Melalui pemeriksaan dan reviu atas laporan keuangan, Inspektorat menilai apakah penggunaan dana daerah telah sesuai dengan peraturan, tidak disalahgunakan, dan didukung oleh bukti yang valid. Peran ini sangat penting dalam mewujudkan transparansi, karena dengan pengawasan yang kuat, masyarakat dapat melihat bahwa keuangan daerah dikelola secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

## **3. Mereviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sebelum Di Serahkan kepada BPK**

Inspektorat melakukan reviu sebagai bentuk penjaminan mutu (quality assurance) terhadap LKPD. Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai.

Inspektorat melakukan penelaahan atas penyajian laporan keuangan, termasuk Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan, dan laporan lainnya. Penelaahan ini

memastikan bahwa setiap angka dalam laporan memiliki dasar pencatatan yang benar, konsisten dengan regulasi, dan sesuai dengan bukti transaksi. Inspektorat melakukan uji kelayakan data dan verifikasi dokumen. Langkah ini mencakup pengecekan kesesuaian antara dokumen pendukung dengan angka yang tersaji dalam laporan keuangan, seperti SPJ, bukti belanja, laporan aset, saldo kas, rekonsiliasi bank, dan laporan persediaan. Verifikasi ini membantu mendeteksi adanya kesalahan pencatatan, perbedaan data antar perangkat daerah, atau potensi salah saji yang dapat memengaruhi opini BPK. Inspektorat menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap perangkat daerah. Penilaian ini penting karena kelemahan SPI sering menjadi temuan BPK. Dengan melakukan reviu SPI terlebih dahulu, Inspektorat dapat memberikan rekomendasi perbaikan lebih awal, sehingga risiko temuan berulang dapat diminimalkan. Inspektorat menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang berisi catatan, koreksi, dan rekomendasi perbaikan atas LKPD. Perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti temuan tersebut sebelum laporan keuangan dikompilasi menjadi LKPD final. Tujuan akhirnya adalah memastikan laporan keuangan pemerintah kota lebih akurat, wajar, dan siap diperiksa oleh BPK sehingga dapat meningkatkan peluang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### **4. Pencegahan dan Deteksi Kecurangan (Fraud) dalam Pemerintahan Daerah**

Inspektorat memiliki fungsi krusial dalam mencegah dan mendeteksi berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Melalui audit investigatif, evaluasi risiko, serta penyusunan strategi pengendalian intern, Inspektorat membantu mengidentifikasi titik rawan fraud dan memberikan rekomendasi perbaikan. Peran ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena Inspektorat melakukan pembinaan kepada perangkat daerah untuk membangun budaya integritas, kepatuhan, dan anti-korupsi dalam setiap proses pengelolaan anggaran.

## **5. Pembinaan, Konsultasi, dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah**

Selain melakukan pengawasan, Inspektorat juga berperan sebagai mitra strategis perangkat daerah melalui kegiatan pembinaan dan konsultasi. Inspektorat memberikan bimbingan teknis terkait sistem pengendalian intern, tata kelola keuangan, penyusunan laporan, hingga implementasi program dan kegiatan agar sesuai dengan regulasi. Dengan membantu meningkatkan kompetensi aparatur, Inspektorat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif.

### **2.1.1.3 Standar Profesi Auditor Internal**

Berikut 3 Standar Profesi Auditor Internal yang paling penting :

#### **1. Kode Etik Auditor Internal**

Kode etik merupakan dasar perilaku profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap auditor internal dalam menjalankan tugas pengawasan. Kode etik menekankan pentingnya integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Integritas menuntut auditor untuk bertindak jujur dan menjaga kepercayaan publik, sementara objektivitas mengharuskan auditor bebas dari konflik kepentingan sehingga penilaian yang diberikan tetap

independen. Selain itu, auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan serta memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan. Kompetensi juga menjadi syarat utama, di mana auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, dan kecermatan profesional yang memadai untuk memberikan keyakinan bahwa hasil audit dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Standar Atribut (Attribute Standards)**

Standar atribut menjelaskan karakteristik dasar yang harus melekat pada fungsi audit internal dan auditor sebagai pelaksana tugas pengawasan. Standar ini mengatur bahwa audit internal harus memiliki landasan hukum dan mandat yang jelas melalui piagam audit (audit charter), sehingga tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab unit audit tidak tumpang tindih dengan fungsi lainnya. Selain itu, standar atribut menegaskan perlunya independensi dan objektivitas auditor agar proses penilaian tidak terpengaruh tekanan pihak tertentu. Auditor internal juga diwajibkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas tugas serta menjalankan program penjaminan mutu (quality assurance) untuk memastikan seluruh kegiatan audit memenuhi standar profesional. Dengan demikian, standar atribut berfungsi sebagai pondasi struktural dan kompetensial bagi terselenggaranya audit yang berkualitas.

## **3. Standar Kinerja (Performance Standards)**

Standar kinerja mengatur bagaimana audit harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara sistematis sehingga seluruh proses pengawasan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Dalam standar ini,

auditor dituntut menyusun rencana audit berbasis risiko, menentukan tujuan dan ruang lingkup penugasan, serta merancang metodologi pemeriksaan yang tepat. Selama pelaksanaan audit, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai dasar temuan dan rekomendasi yang diberikan. Standar kinerja juga mengatur kewajiban auditor dalam menyusun laporan hasil audit yang jelas, objektif, serta tepat waktu, sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan organisasi. Selain itu, auditor wajib melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan untuk memastikan perbaikan benar-benar dilaksanakan.

#### **2.1.1.4 Tahap-Tahap Audit Internal**

##### **1. Tahap Perencanaan (Planning)**

Tahap perencanaan adalah langkah awal yang menentukan keberhasilan audit. Pada tahap ini auditor internal mengumpulkan informasi awal mengenai objek audit, memahami proses bisnis, melakukan identifikasi risiko, serta menilai efektivitas pengendalian intern secara umum. Auditor kemudian menetapkan tujuan, ruang lingkup, metode, jadwal, serta kebutuhan sumber daya audit. Perencanaan yang baik memastikan audit berjalan fokus pada area yang berisiko tinggi serta menghindari kegiatan yang tidak relevan atau kurang berdampak.

##### **2. Penyusunan Program Audit (Audit Program Development)**

Setelah perencanaan selesai, auditor menyusun program audit yang berisi langkah-langkah pemeriksaan yang akan dilakukan. Program audit

menjadi pedoman kerja auditor selama proses audit berlangsung. Di dalamnya tercantum prosedur detail, teknik pengumpulan bukti, jenis pengujian, hingga alokasi waktu untuk masing-masing kegiatan. Program audit memudahkan auditor bekerja secara sistematis, konsisten, dan terarah, sekaligus memastikan bahwa seluruh risiko signifikan telah ditangani melalui prosedur yang tepat.

### **3. Pelaksanaan Audit (Fieldwork / Examination)**

Pada tahap ini auditor mengaplikasikan semua prosedur yang tercantum dalam program audit untuk mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Auditor melakukan wawancara, observasi, pengecekan dokumen, pengujian kepatuhan, serta pengujian substantif. Dari hasil pemeriksaan tersebut, auditor menilai efektivitas pengendalian intern, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta mengidentifikasi temuan yang menunjukkan adanya penyimpangan atau risiko operasional. Tahap ini merupakan inti dari audit karena seluruh analisis dan evaluasi berbasis pada bukti yang dikumpulkan.

### **4. Penyusunan Laporan Audit (Reporting)**

Setelah pelaksanaan audit selesai, auditor menyusun laporan yang merangkum temuan, analisis, penyebab, dampak, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Laporan audit harus objektif, jelas, komprehensif, dan disajikan tepat waktu agar dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini auditor juga melakukan diskusi dengan pihak yang diaudit untuk memastikan temuan dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman terkait kondisi yang

sebenarnya.

## **5. Tindak Lanjut (Follow-Up)**

Tahap tindak lanjut merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan auditor benar-benar diterapkan oleh unit kerja terkait. Auditor memeriksa apakah perbaikan telah dilakukan, apakah risiko telah berkurang, serta menilai apakah tindakan korektif sudah efektif. Jika rekomendasi belum ditindaklanjuti, auditor memberikan catatan tambahan atau meminta penyempurnaan. Tahap ini memastikan bahwa audit memberi manfaat nyata bagi organisasi dan mendorong peningkatan akuntabilitas serta kualitas pengendalian internal.

### **2.1.2 Indikator Kualitas Audit Pemerintahan**

Kualitas audit merupakan kemungkinan menemukan kejanggalan kemudian melaporkannya, hal ini erat kaitannya dengan kualitas individu dari seorang auditor. Seiring dengan berkembangnya zaman, kualitas audit menjadi sesuatu yang relatif, tergantung sudut pandang mana yang akan diperiksa. Objektivitas yang digambarkan sebagai kemampuan auditor untuk membebaskan diri dari konflik kepentingan terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas audit (Ibrahim et al., 2023).

#### **1. Kompetensi Auditor**

Kompetensi merupakan indikator utama kualitas audit karena menentukan kemampuan auditor dalam memahami regulasi pemerintah, sistem pengendalian intern, serta teknik audit sektor publik. Auditor yang kompeten memiliki pengetahuan memadai tentang SAP, peraturan keuangan daerah, metodologi audit, dan kemampuan analitis yang kuat.

Dengan kompetensi tersebut, auditor mampu mengidentifikasi kesalahan penyajian, kelemahan sistem, dan potensi penyimpangan secara lebih tepat dan akurat. Semakin tinggi kompetensi auditor, semakin tinggi pula kualitas hasil audit yang dihasilkan.

## **2. Independensi Auditor**

Independensi menggambarkan kemampuan auditor untuk bekerja bebas dari tekanan pihak manapun. Dalam audit pemerintahan, independensi sangat penting karena auditor sering berhadapan dengan pejabat atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil audit. Auditor harus menjaga objektivitas dan tidak membiarkan hubungan personal, tekanan organisasi, atau kepentingan politik memengaruhi penilaian mereka. Audit yang dilakukan secara independen akan menghasilkan laporan yang objektif, jujur, dan dapat dipercaya oleh publik maupun lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK.

## **3. Kepatuhan terhadap Standar Audit**

Audit yang berkualitas harus dilaksanakan sesuai standar yang berlaku, seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Standar APIP, dan pedoman audit internal lainnya. Kepatuhan terhadap standar memastikan bahwa proses audit dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut. Jika auditor menjalankan setiap prosedur sesuai standar, hasil audit akan lebih konsisten, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan ini juga menghindari terjadinya pemeriksaan yang asal-asalan atau tidak memiliki dasar metodologis yang kuat.

#### **4. Efektivitas Pengendalian Mutu (Quality Control)**

Kualitas audit pemerintahan juga dilihat dari sejauh mana unit pengawasan internal menerapkan sistem pengendalian mutu audit. Pengendalian mutu meliputi supervisi, review atas kertas kerja, evaluasi hasil audit, hingga mekanisme quality assurance. Dengan pengendalian mutu yang efektif, kesalahan audit dapat diminimalisir, dan hasil pemeriksaan menjadi lebih akurat. Selain itu, kontrol mutu memastikan setiap auditor bekerja sesuai pedoman, tidak melewati prosedur penting, serta menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi.

#### **5. Ketepatan Waktu Penyelesaian Audit**

Ketepatan waktu merupakan indikator penting karena audit yang terlambat dapat mengurangi manfaat informasi bagi pengambilan keputusan pemerintah daerah. Auditor harus menyelesaikan pemeriksaan sesuai jadwal, terutama dalam audit atas laporan keuangan yang memiliki batas penyampaian ke BPK. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa auditor bekerja efisien, memiliki perencanaan yang baik, dan mampu mengelola sumber daya secara efektif. Audit yang tepat waktu juga membantu pemerintah daerah segera melakukan perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan.

### **2.1.3 Review atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota**

#### **1. Definisi Review**

Review adalah proses penelaahan kembali secara kritis terhadap pekerjaan, dokumen, atau informasi tertentu untuk menilai apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan sesuai kriteria.

Review dilakukan sebagai bentuk quality control dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu independensi, kompetensi dan audit tenure, suatu studi literatur audit (Mailangkay & Nugrahanti, 2024).

Pertama, Inspektorat melakukan penelaahan atas penyajian laporan keuangan, termasuk Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan, dan laporan lainnya. Penelaahan ini memastikan bahwa setiap angka dalam laporan memiliki dasar pencatatan yang benar, konsisten dengan regulasi, dan sesuai dengan bukti transaksi.

Kedua, Inspektorat melakukan uji kelayakan data dan verifikasi dokumen. Langkah ini mencakup pengecekan kesesuaian antara dokumen pendukung dengan angka yang tersaji dalam laporan keuangan, seperti SPJ, bukti belanja, laporan aset, saldo kas, rekonsiliasi bank, dan laporan persediaan. Verifikasi ini membantu mendeteksi adanya kesalahan pencatatan, perbedaan data antar perangkat daerah, atau potensi salah saji yang dapat memengaruhi opini BPK.

Ketiga, Inspektorat menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap perangkat daerah. Penilaian ini penting karena kelemahan SPI sering menjadi temuan BPK. Dengan melakukan reuiu SPI terlebih dahulu, Inspektorat dapat memberikan rekomendasi perbaikan lebih awal, sehingga risiko temuan berulang dapat diminimalkan.

Keempat, Inspektorat menyusun Laporan Hasil Reuiu (LHR) yang berisi catatan, koreksi, dan rekomendasi perbaikan atas LKPD. Perangkat

daerah diwajibkan menindaklanjuti temuan tersebut sebelum laporan keuangan dikompilasi menjadi LKPD final. Tujuan akhirnya adalah memastikan laporan keuangan pemerintah kota lebih akurat, wajar, dan siap diperiksa oleh BPK sehingga dapat meningkatkan peluang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai aktualisasi peranan inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah kota Tanjungbalai dapat dikuatkan melalui kajian-kajian terdahulu yang relevan. Secara umum, fungsi inspektorat dalam konteks pengauditan internal sangat krusial dalam memastikan akuntabilitas keuangan publik serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek penting dari penelitian adalah bagaimana pengalaman auditor dan independensi mereka berhubungan dengan kualitas audit. Pengalaman auditor dan independensi berkontribusi positif terhadap kualitas audit, yang berimplikasi langsung pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa dengan meningkatkan kualitas audit, inspektorat dapat berperan lebih efektif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Pengalaman auditor memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman berfungsi sebagai metode pembelajaran yang efektif bagi auditor internal, memperkaya mereka dengan berbagai teknik audit. Auditor yang berpengalaman cenderung lebih mahir dalam melaksanakan tugas audit mereka, yang pada gilirannya menghasilkan hasil pemeriksaan yang lebih

baik. Dengan semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki, seorang auditor menjadi lebih ahli dan mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul selama proses audit (Ahmad et al., 2024)

Menurut Hariadi & Slamet (2020) Inspektorat memanfaatkan risk assessment dan kepatuhan terhadap standar akuntansi global dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Perencanaan audit intern Inspektorat Utama merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mempertimbangkan risiko mulai dari tahap perencanaan strategis, perencanaan audit tahunan, hingga penugasan audit individu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa pengintegrasian perspektif risiko dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas serta mendorong transparansi, yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut Gendong et al., n.d. (2024) Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berfokus pada pentingnya kontrol anggaran untuk memastikan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi focus. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol anggaran yang baik, yang diimplementasikan melalui fungsi inspektorat, mampu menciptakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Hanifah et al., (2023) Audit Internal memiliki fungsi membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses bisnis yang ada di perusahaan. Audit internal juga bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi perubahan dan memastikan bahwa organisasi mengikuti semua hukum dan peraturan yang berlaku, mengelaborasi tentang pengaruh sistem

pengendalian internal terhadap kualitas pengelolaan keuangan, yang menyoroti pentingnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi di dalam struktural inspektorat menjadi faktor penting dalam penguatan akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam konteks akuntabilitas, yang menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit memperlihatkan bahwa semua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Melalui pendekatan yang serupa, peran aktif inspektorat dalam pengauditan internal bisa mendorong peningkatan lain dalam praktik akuntabilitas keuangan di pemerintah kota Tanjungbalai.

Dengan mencermati berbagai studi di atas, jelas bahwa sinergi antara kualitas audit, sistem pengendalian internal, dan independensi auditor sangat menentukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa inspektorat, dengan fungsi audit internalnya, tidak hanya berperan dalam mencegah penyimpangan, tetapi juga dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berikut ini tabel ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Aktualisasi Audit Internal dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Istiqomah et al., 2022)	“Pengaruh Internal Terhadap Pemerintah	Metode Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep.
2.	(Rialdy et al., 2023)	“Internal Auditor Professionalism: Determinants and Its Effect on Behavior Auditor Ethics”	Metode Pendekatan Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa intensitas moral dan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme dan perilaku etis auditor, dan profesionalisme mempengaruhi perilaku etis auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara.
3.	(Sipayung & Morasa, 2021)	“Evaluasi Internal Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Tomohon ”	Metode pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan yang efektif dan efisien dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah dengan cara membandingkan badan keuangan daerah dengan laporan keuangan daerah konsolidasi.
4.	(Lakoro, 2024)	“Analisis Kualitas Audit	Metode pendekatan kualitatif	Pengalaman kerja terbukti memberikan pengaruh pada tingkat kualitas analisis keuangan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo.

5.	(Siregar et al., 2019)	“Pengaruh moral reasoning, skeptisme profesional dan kecerdasan spiritual terhadap kualitas audit pada BPKP Provinsi Sumatera Utara”	Metode pendekatan asosiatif dan kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian moral reasoning berpengaruh terhadap kualitas audit, skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit, kecerdasan spiritual auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, dan moral reasoning, skeptisme profesional, dan kecerdasan spiritual auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit
6.	(Pratama et al., 2024)	Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023)	pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif.	Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik. Kinerja Inspektorat TA 2023 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan

				fungsi dengan lebih optimal
7.	(Kurniawan et al., 2023)	Pengawasan keuangan melalui inspektorat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten kuantan singingi	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dilakukan langsung di lapangan yang	Masih banyaknya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Seharusnya dengan adanya Inspektorat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan, penyimpangan atau ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dicegah atau diminimalisir
8.	Zulkifli Umar,Cut Fittika Syawalina (2020)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi inspektorat aceh	Peralatan analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi linier berganda	Hasil secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor

				Inspektorat Aceh.
9.	(Saniya et al., 2025)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan masing-masing
		berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja inspektorat kabupaten bengkulutengah		memiliki dampak signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya menerapkan praktik keuangan dan administrasi yang baik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam operasi pemerintahan, serta memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
10.	(Edowati et al., 2021)	Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten deiyai	Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Dengan kata lain semakin tinggi akuntabilitas maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai akan semakin meningkat pula, semakin transparansi pengelolaan

				keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai akan semakin meningkat..
--	--	--	--	--

## 2.3 Kerangka Berpikir

### 2.3.1 Inspektorat Kota Tanjungbalai

Menurut regulasi yang ada, Inspektorat berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, dan ini termasuk audit internal yang mendalam. Melalui audit ini, Inspektorat berperan dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di dalam manajemen keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menjaga agar anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan efektif. Salah satu elemen inti dari peran Inspektorat adalah pengawasan yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, di mana setiap penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Sinaga et al., 2020).

Inspektorat Kota Tanjungbalai merupakan lembaga yang memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah. Secara fungsional, inspektorat bertanggung jawab dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran serta memastikan bahwa semua transaksi keuangan mengikuti regulasi yang berlaku. Lembaga ini beroperasi sebagai bagian dari pemerintah daerah dan bertugas untuk mendukung transparansi serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks penelitian ini, Inspektorat berperan sebagai subjek utama yang akan diteliti perannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian

ini akan mengkaji bagaimana Inspektorat menjalankan fungsi-fungsi audit internalnya, tantangan yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

### **2.3.2 Audit Internal**

Audit internal adalah proses sistematis dan objektif dalam menilai serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola organisasi. Dalam konteks publik, audit internal memiliki peranan penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan aktivitas pemerintah. Audit internal diadakan tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan regulasi yang ditetapkan, tetapi juga untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga dapat membantu dalam mencapai tujuan strategis serta meningkatkan nilai kepada pemangku kepentingan.

Penelitian oleh Suyono dan Hariyanto menunjukkan bahwa audit internal berhubungan erat dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Audit internal membantu manajemen dalam menilai risiko yang ada dan meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan masukan yang berharga tentang kinerja organisasi. Kualitas audit internal yang baik juga berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan keuangan, memastikan bahwa semua laporan keuangan yang disajikan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit internal merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang penting untuk memastikan bahwa organisasi publik seperti Inspektorat Kota Tanjungbalai dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat beroperasi secara efisien dan efektif.

### **2.3.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai**

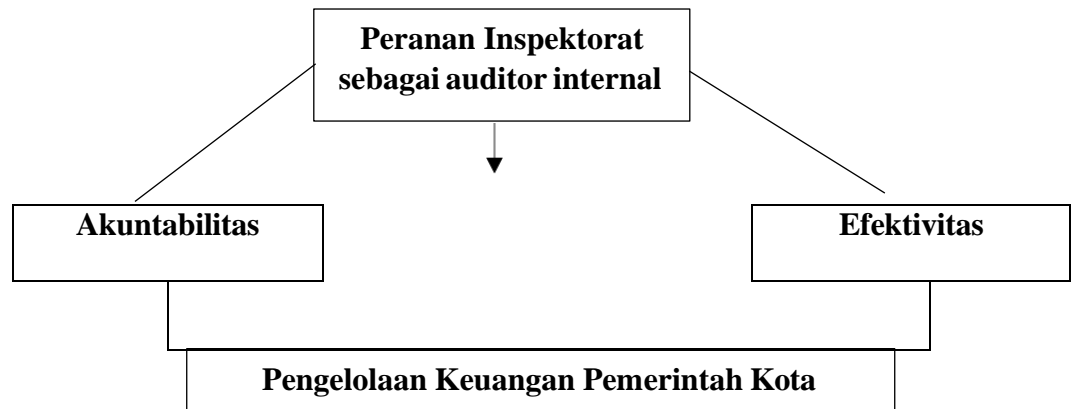
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai merujuk pada kewajiban pemerintah daerah untuk menyajikan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan melalui laporan keuangan yang akurat dan transparan. Hal ini mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara efisien dan efektif demi mencapai tujuan pembangunan daerah.

Akuntabilitas ini diwujudkan dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berfungsi untuk memberikan opini audit mengenai kewajaran dan kebenaran laporan yang disajikan. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Tanjungbalai merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berfokus pada penciptaan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Agasya & Jatnika, 2021)

### **2.3.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai**

Efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah ukuran sejauh mana sumber daya dan anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara tepat waktu dan berkualitas. Efektivitas ini diukur berdasarkan sejauh mana realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran, serta bagaimana hasil dari pengelolaan tersebut dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat (Fadillah et al. 2023). Dalam hal ini, pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

dan pencapaian target-target pembangunan daerah (Dewi & Suci, 2023). Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan menjadi kunci dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan mendorong akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan anggaran publik (Syachbrani, 2024).



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Menurut Efendi et al. (2020) menemukan bahwa peran aktif Inspektorat sebagai APIP berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas laporan keuangan. Menurut Siregar dan Lubis (2021) juga menyimpulkan bahwa lemahnya peran Inspektorat dapat menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil-hasil penelitian tersebut mendukung pentingnya peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efektif.

Dalam konteks penelitian ini **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019** masih menjadi dasar hukum utama untuk pengaturan peranan Inspektorat sampai sekarang, karena belum ada Peraturan Pemerintah terbaru yang khusus tentang peranan Inspektorat. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Inspektorat sebagai auditor internal memiliki peran strategis dalam meningkatkan

akuntabilitas dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota. Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan internal melalui audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan dan tepat waktu, sedangkan efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan pengelolaan keuangan dapat dicapai secara optimal. Dengan demikian, semakin optimal peranan Inspektorat sebagai auditor internal, maka semakin meningkat pula kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, observasi, dan dokumen. Penelitian ini berfokus pada makna, proses, serta perspektif subjek yang diteliti sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu permasalahan dalam konteks yang alami. Dalam penelitian skripsi, metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena secara lebih detail sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan mendukung temuan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa jawaban yang diberikan oleh responden, kemudian dianalisis untuk menggali makna dan pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif auditor internal, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut.

Jenis penelitian deskriptif menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau memberi perlakuan pada variabel. Penelitian deskriptif sering digunakan untuk memahami bagaimana suatu proses berlangsung, bagaimana peran suatu lembaga, atau bagaimana suatu fenomena muncul berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Badan Inspektorat Kota Tanjungbalai menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menggali bagaimana interaksi dan pengalaman yang dialami oleh auditor internal dalam menjalankan tugas pengawasan mereka yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang proses, interaksi, serta pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan audit laporan keuangan pemerintah yang pastinya harus sesuai aturan yang berlaku.

### **3.2 Definisi Variabel**

Yang menjadi subjek dari definisi operasional Kantor Inspektorat Kota Tanjung balai adalah pihak atau individu yang berperan aktif dalam proses penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, subjeknya adalah Inspektorat Kota Tanjungbalai sebagai auditor internal pemerintahan. Inspektorat memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan pemerintahan yang disusun oleh dinas-dinas terkait di Kota Tanjungbalai.

Objek penelitian adalah hal atau fenomena yang menjadi fokus atau yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, objeknya adalah peran Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan pemerintahan Kota Tanjungbalai. Definisi operasional objek penelitian adalah Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal yaitu mengacu pada tindakan, kegiatan, atau fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat dalam melakukan audit, pengawasan, serta evaluasi terhadap laporan keuangan dan proses akuntabilitas pemerintahan di

Kota Tanjungbalai dan pada Laporan Keuangan Pemerintahan menunjuk pada tingkat akurasi, transparansi, ketepatan, dan ketaatan pada standar akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjung balai.

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari kantor Inspektorat kota Tanjung balai yang ber Alamat di Jl. Gaharu No.12 Kel,Sirantau,Kec.Datuk Bandar,Kota Tanjungbalai,Sumatera Utara 21332 dan juga menggunakan website inspektorat.tanjungbalaikota.go.id.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal											■	■								
5	Revisi Proposal													■	■						
6	Penelitian													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
8	Sidang																			■	■

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, khususnya mengenai aktualisasi peranan Inspektorat sebagai auditor internal

dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang komprehensif berdasarkan data berupa informasi, pandangan, dan pengalaman narasumber yang diperoleh melalui teknik wawancara.

### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui serangkaian wawancara tatap muka yang terstruktur namun fleksibel dengan berbagai pihak yang memiliki peran kunci di kantor Inspektorat. Wawancara ini untuk menggali informasi mendalam dan peran Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui wawancara ini peneliti dapat memperoleh data faktual dari narasumber yang berkompeten, memahami persepsi dan pengalaman auditor internal, serta mengklarifikasi informasi yang tidak tercantum dalam dokumen. Dengan demikian, wawancara menjadi instrumen penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan praktik pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber adalah :

#### **1. Inspektur (Kepala Inspektorat)**

Wawancara dengan Inspektur bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai arah kebijakan, strategi, serta komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai auditor internal

pemerintah daerah. Peneliti dapat menggali bagaimana Inspektur memandang pentingnya penguatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan, kebijakan apa yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas audit, serta bagaimana koordinasi dilakukan dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu, wawancara ini membantu memahami visi jangka panjang Inspektorat dalam membangun sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas.

## **2. Sekretaris Inspektorat**

Tujuan wawancara dengan Sekretaris Inspektorat adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan administrasi, koordinasi internal, serta dukungan manajerial yang diberikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan audit di Inspektorat. Sekretaris Inspektorat berperan dalam mengatur perencanaan program, distribusi sumber daya, manajemen kepegawaian, serta memastikan kelancaran operasional organisasi. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memahami bagaimana aspek administrasi, tata kelola internal, dan dukungan struktural berkontribusi terhadap efektivitas audit serta bagaimana Inspektorat memastikan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

## **3. Bendahara**

Wawancara dilakukan terhadap Bendahara Inspektorat Kota Tanjungbalai sebagai salah satu narasumber penelitian. Pemilihan Bendahara Inspektorat didasarkan pada perannya yang strategis dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Inspektorat. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi terkait proses

pengelolaan keuangan, mekanisme pengawasan internal, serta upaya yang dilakukan dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **4. Auditor Madya**

Wawancara dengan Auditor Madya bertujuan menggali pengalaman teknis dan profesional yang lebih mendalam terkait pelaksanaan audit yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi. Auditor Madya biasanya menangani audit dengan ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memberikan insight tentang metode audit yang digunakan, kualitas bukti audit, serta tantangan ketika menemukan ketidaksesuaian pengelolaan keuangan pada perangkat daerah. Tujuan lainnya adalah mengetahui bagaimana auditor senior menilai efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah serta bagaimana rekomendasi audit disusun dan dikomunikasikan.

#### **5. Kasubbag Perencanaan atau Kasubbag Umum**

Kasubbag Perencanaan/Umum memahami dukungan administratif, perencanaan program pengawasan, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan audit mendapat dukungan logistik, dokumen, serta perencanaan jadwal yang jelas. Wawancara ini juga memberikan perspektif mengenai bagaimana manajemen internal Inspektorat berkontribusi pada keberhasilan pengawasan dan efektivitas operasional auditor.

#### **6. Sub Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi**

Sub bagian ini bertanggung jawab atas perencanaan program kerja

Inspektorat, analisis data kinerja, dan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Wawancara dengan staf di sub bagian ini akan mengungkap bagaimana proses perencanaan dilakukan, metode analisis data yang digunakan, indikator kinerja yang dievaluasi, serta bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan di masa mendatang. Wawancara dilakukan secara semi-erstruktur, artinya peneliti memiliki daftar pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh responden, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi responden untuk menyampaikan informasi tambahan, pendapat, atau pengalaman yang relevan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian ini teknik dan pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

#### **1. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

#### **2. Wawancara**

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada Beberapa Struktural yang terkait di Inspektorat Kota Tanjung balai.

Adapun kisi-kisi wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data ini adalah :

**Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data**

No.	Pertanyaan
1.	Apa saja peran utama Inspektorat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan bagaimana peran tersebut dikaitkan dengan akuntabilitas?
2.	Bagaimana proses audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Tanjungbalai?
3.	Apa saja hambatan bagi Inspektorat serta kendalanya dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal?
4.	Bagaimana kolaborasi antara Inspektorat dan instansi pemerintah lainnya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan?
5.	Bagaimana Inspektorat berperan dalam mencegah kecurangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah?
6.	Apa saja upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas auditor internal?
7.	Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengauditan yang dilakukan oleh Inspektorat?
8.	Bagaimana Inspektorat menyikapi laporan keuangan yang diserahkan tidak tepat waktu?
9.	Bagaimana akhirnya Inspektorat bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian setelah dua tahun terakhir mendapat opini wajar dengan pengecualian?
10.	Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang sudah baik tersebut?

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa data

dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa adanya maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara agar sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis guna memberikan gambaran mengenai aktualisasi peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.. Adapun tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari Inspektorat kota Tanjung balai.
2. Menganalisis peranan inspektorat untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para auditor di Inspektorat Kota Tanjungbalai sebagai narasumber utama. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi terkait aktualisasi peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Proses wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang auditor yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengawasan internal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan jawaban responden untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran Inspektorat dalam pengelolaan keuangan daerah, tujuh orang auditor diantaranya adalah :

##### **1. Sekretaris Inspektorat**

Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kota Tanjungbalai adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan administrasi, koordinasi internal, serta dukungan manajerial yang diberikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan audit di Inspektorat. Sekretaris Inspektorat berperan dalam mengatur perencanaan program, distribusi sumber daya, manajemen kepegawaian, serta memastikan kelancaran operasional organisasi. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memahami

bagaimana aspek administrasi, tata kelola internal, dan dukungan struktural berkontribusi terhadap efektivitas audit serta bagaimana Inspektorat memastikan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

## 2. Auditor Madya

Wawancara dengan Auditor Madya Inspektorat Kota Tanjungbalai dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan internal, khususnya dalam proses audit, reviu laporan keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Auditor Madya dipilih sebagai narasumber karena memiliki pengalaman teknis dan tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan audit internal di lingkungan pemerintah daerah. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pandangan, pengalaman, serta penilaian Auditor Madya terkait aktualisasi peran Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## 3. Auditor Mahir

Wawancara dengan Auditor Mahir Inspektorat Kota Tanjungbalai dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan teknis pengawasan dan pemeriksaan di lapangan. Auditor Mahir dipilih sebagai narasumber karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses audit, pengumpulan bukti pemeriksaan, serta penyusunan kertas kerja audit. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi terkait pengalaman praktis dalam menilai kepatuhan OPD terhadap regulasi pengelolaan keuangan, hambatan yang dihadapi selama proses audit, serta kontribusi

auditor dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

#### 4. Auditor Muda

Wawancara dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Tanjungbalai dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas audit pada tingkat pelaksana awal. Auditor Muda umumnya terlibat dalam kegiatan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, serta membantu penyusunan kertas kerja audit sesuai arahan auditor senior. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pengalaman teknis, pemahaman terhadap prosedur audit, serta pandangan Auditor Muda mengenai peran Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

#### 5. Auditor Utama

Wawancara dengan Auditor Utama Inspektorat Kota Tanjungbalai dilakukan untuk memperoleh perspektif strategis mengenai arah kebijakan dan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Auditor Utama dipilih sebagai narasumber karena memiliki pengalaman dan kewenangan yang lebih tinggi dalam merumuskan strategi pengawasan, mengevaluasi hasil audit, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan peraturan yang berlaku. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pandangan terkait aktualisasi peran Inspektorat secara menyeluruh dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

#### 6. Inspektur Pembantu (Irban) III

Wawancara dengan Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Kota Tanjungbalai dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pada lingkup wilayah atau bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Irban III memiliki peran dalam mengoordinasikan tim audit, mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan, serta mengevaluasi hasil pengawasan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi terkait strategi pengawasan, pengendalian mutu audit, serta kontribusi unit Irban dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

#### 7. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya

Wawancara dengan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya Inspektorat Kota Tanjungbalai dilakukan untuk memperoleh perspektif mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. PPUPD Madya memiliki peran dalam melakukan evaluasi, monitoring, serta pembinaan terhadap perangkat daerah guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pandangan terkait kontribusi pengawasan tersebut dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil wawancara selanjutnya akan disajikan berdasarkan indikator dan fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara teori yang digunakan dengan kondisi empiris di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuh auditor internal di Kantor Inspektorat Tanjung Balai, ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dalam tanggapan mereka mengenai berbagai aspek terkait pelaksanaan tugas auditor internal dalam melakukan audit laporan keuangan. Maka diperoleh jawaban :

1. Apa saja peran utama Inspektorat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan bagaimana peran tersebut dikaitkan dengan akuntabilitas?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan hal yang sama bahwa peran utama Inspektorat ialah mengawasi dan membina, bukan bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan Pemerintah Kota. Nara sumber menyatakan bahwa peran utama Inspektorat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai pengawas internal yang melaksanakan audit, reviu, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan. Peran tersebut dikaitkan langsung dengan peningkatan akuntabilitas karena melalui fungsi pengawasan, Inspektorat dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Namun demikian, terdapat 2 narasumber yang memberikan pandangan berbeda. Mereka menekankan

bahwa peran Inspektorat tidak hanya sebatas fungsi pengawasan dan pemeriksaan, tetapi juga sebagai pembina bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut mereka, Inspektorat berperan dalam memberikan pendampingan, konsultasi, serta pembinaan agar OPD mampu menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas. Dalam konteks akuntabilitas, peran ini dianggap lebih preventif karena tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi juga membantu mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses pengelolaan keuangan. Sebanyak 71,43% (5 dari 7 informan) menyatakan bahwa auditor internal telah melakukan pemeriksaan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar audit pemerintahan. Namun, 28,57% (2 informan) menilai bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki.

2. Bagaimana proses audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Tanjungbalai?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan hal yang sama bahwa proses audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tanjungbalai diawali dengan perencanaan pengawasan melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disesuaikan dengan tingkat risiko pada masing-masing OPD. Selanjutnya, auditor melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam proses tersebut,

Inspektorat juga menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam LAKIP yang disertai rekomendasi perbaikan dan ditindaklanjuti melalui pemantauan oleh Inspektorat. Sebanyak 71,43% (5 dari 7 informan) menyatakan bahwa auditor internal telah melakukan pemeriksaan kualitas laporan keuangan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga penyusunan laporan hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi. Namun 28,57% (2 informan) berpendapat bahwa proses audit tidak hanya berfokus pada pemeriksaan setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga perlu diperkuat melalui pendekatan preventif seperti reviu dan pendampingan sebelum laporan keuangan disampaikan, agar potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak awal sesuai dengan standar audit pemerintahan.

3. Apa saja hambatan bagi Inspektorat serta kendalanya dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan hambatan yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah keterbatasan sumber daya manusia auditor, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga pelaksanaan pengawasan berbasis risiko belum sepenuhnya optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam SPIP. Selain itu, efektivitas sistem pengendalian intern pada beberapa OPD masih

lemah, ketidak tepatan waktu pengumpulan karena beberapa Dinas (Kesehatan,Pendidikan,Perkim,PU) yang memiliki aset dan pendapatan yang sangat banyak. Sebanyak 57,14% (4 dari 7 responden) menyatakan bahwa hambatan utama yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis auditor, serta keterbatasan anggaran pengawasan. Kemudian 28,57% (2 informan) berpendapat bahwa kendala yang lebih dominan terletak pada rendahnya kepatuhan dan pemahaman sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap regulasi pengelolaan keuangan. Dan 14,29% (1 informan lainnya) menyampaikan bahwa hambatan bagi Inspektorat yaitu keterlambatan OPD dalam penyampaian laporan keuangannya.

4. Bagaimana kolaborasi antara Inspektorat dan instansi pemerintah lainnya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan kolaborasi antara Inspektorat dengan instansi pemerintah lainnya, seperti OPD, dan BPK, berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif, Inspektorat dapat memperoleh data dan informasi keuangan yang lebih akurat serta memahami permasalahan pengelolaan keuangan di masing-masing OPD, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dalam bentuk pendampingan, asistensi, dan pembinaan kepada OPD

membantu meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap regulasi dan sistem pengendalian intern. Dengan adanya kolaborasi tersebut, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan juga menjadi lebih optimal, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. Sebanyak 85,71% (6 dari 7 responden) menyatakan bahwa kolaborasi antara Inspektorat dan instansi pemerintah lainnya, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta aparat pengawas eksternal, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, para informan menilai bahwa sinergi yang baik mampu meminimalkan kesalahan dan memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Namun, 14,29% (1 informan) berpendapat bahwa efektivitas kolaborasi masih bergantung pada komitmen dan komunikasi masing-masing instansi. Apabila koordinasi tidak berjalan optimal, maka tindak lanjut atas temuan audit dapat terhambat dan berdampak pada kurang maksimalnya peningkatan akuntabilitas.

5. Bagaimana Inspektorat berperan dalam mencegah kecurangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan Inspektorat melakukan pembinaan kepada setiap OPD, mulai dari audit, reviu, hingga konsultasi. Diharapkan harus selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan memberikan saran tersebut pasti kecurangan akan bisa diminimalisir. Inspektorat melakukan pembinaan

dan sosialisasi terkait kepatuhan terhadap regulasi, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan diminimalkan sejak dini. Para responden menilai bahwa peran preventif ini sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebanyak 71,43% (5 dari 7 responden) menilai bahwa auditor internal telah melakukan pengawasan yang cukup terhadap pencegahan pelanggaran. Namun 28,57% (2 informan) berpendapat bahwa pengawasan terhadap tindakan korektif masih dinilai kurang tegas.

6. Apa saja upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas auditor internal?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan upaya yang dilakukan Inspektorat dengan keikutsertaan auditor dalam pelatihan teknis pengawasan, bimbingan teknis, serta sertifikasi auditor yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Selain itu, Inspektorat juga mendorong peningkatan pemahaman auditor terhadap regulasi terbaru, Standar Audit Intern Pemerintah, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan internal. Upaya lainnya dilakukan dengan pelaksanaan supervisi dan pembelajaran berbasis pengalaman dalam pelaksanaan audit, sehingga auditor internal tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga profesionalisme dan kualitas hasil pengawasan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebanyak 57,14% (4 dari 7 informan) mengatakan upaya yang telah dilakukan Inspektorat

untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas auditor internal antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi auditor sesuai standar pengawasan pemerintah. Namun, 42,86% (3 responden) berpendapat bahwa meskipun berbagai pelatihan telah dilakukan, peningkatan kompetensi masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan audit berbasis risiko. Menurut mereka, penguatan kapabilitas auditor tidak hanya bergantung pada pelatihan formal, tetapi juga pada pengalaman lapangan, pendampingan senior, serta dukungan anggaran yang memadai untuk pengembangan profesional auditor internal.

7. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengauditan yang dilakukan oleh Inspektorat?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan suatu audit itu dikatakan efektif apabila audit itu memberikan dampak terhadap kegiatan pada objek audit tersebut. Jadi, setelah dilakukan audit diharapkan temuan yang sama tidak berulang dan persentase temuan bisa berkurang pada objek pemeriksaan itu. Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan, kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan hasil pemeriksaan, serta persentase tindak lanjut rekomendasi audit yang diselesaikan oleh OPD menjadi indikator untuk mengukur efektivitas pengauditan. Sebanyak 57,14% (4 dari 7 informan) mengatakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengauditan Inspektorat adalah tingkat penyelesaian tindak

lanjut atas rekomendasi hasil audit, penurunan jumlah temuan berulang, ketepatan waktu penyelesaian audit, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun 42,86% (3 responden) berpendapat bahwa efektivitas pengauditan tidak hanya diukur dari indikator kuantitatif, tetapi juga dari perubahan perilaku dan kesadaran aparatur dalam mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab, keberhasilan audit dapat dilihat dari meningkatnya budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

8. Bagaimana Inspektorat menyikapi laporan keuangan yang diserahkan tidak tepat waktu?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan Inspektorat menyikapi laporan keuangan yang diserahkan tidak tepat waktu dengan melakukan klarifikasi kepada OPD terkait untuk mengetahui penyebab keterlambatan, baik yang bersifat administratif maupun teknis. Selanjutnya, Inspektorat memberikan teguran serta rekomendasi perbaikan agar OPD meningkatkan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan yang telah ditetapkan, sekaligus melakukan pendampingan dan pembinaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keterbatasan pemahaman atau kapasitas aparatur. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan tersebut juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan audit dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), karena ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebanyak 71,43% (5 dari 7 responden)

menyatakan bahwa apabila terdapat laporan keuangan yang diserahkan tidak tepat waktu, Inspektorat terlebih dahulu memberikan teguran atau pemberitahuan resmi kepada OPD yang bersangkutan serta meminta klarifikasi terkait penyebab keterlambatan dan melakukan koordinasi dan pendampingan agar laporan segera dilengkapi dan diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, 28,57% (2 responden) berpendapat bahwa perlu diterapkan langkah yang lebih tegas, seperti pemberian rekomendasi sanksi sesuai peraturan apabila keterlambatan terjadi secara berulang, karena ketegasan tersebut penting untuk meningkatkan disiplin dan komitmen OPD dalam menyusun serta menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

9. Bagaimana akhirnya Inspektorat bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian setelah dua tahun terakhir mendapat opini wajar dengan pengecualian?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dari 3 Auditor Madya (57,14%) yang turun langsung kelapangan mengatakan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan hasil dari penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat meningkatkan lagi progres pengawasannya secara paralel agar direkonsiliasi setiap bulan dari aset dan pendapatannya. Jadi jika terdapat selisih-selisih bisa langsung dengan cepat ditelusuri, ketepatan waktu juga sangat penting, Inspektorat memperketat reviu laporan keuangan sebelum diserahkan untuk diaudit serta mendorong

komitmen pimpinan OPD dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan secara tepat waktu. Sebanyak 42,86 % berpendapat bahwa keberhasilan meraih opini WTP bukan hanya karena peran Inspektorat, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan OPD dalam mengelola administrasi keuangan secara lebih tertib dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, konsistensi perbaikan secara berkelanjutan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

10. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang sudah baik tersebut?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengatakan peran auditor sangat besar, auditor itu fungsi utamanya adalah pengawasan. Kualitas laporan keuangan harus tetap dijaga karena itu mencerminkan keberhasilan dari suatu instansi. Inspektorat memberikan konsultasi ke setiap OPD untuk dapat membenahi setiap kelemahan-kelemahan yang ada hingga dilakukan perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Jika laporan keuangannya sudah baik diharapkan dapat mempertahankannya kita karena harus bisa terus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sebanyak 57,14% (4 dari 7 informan) menyatakan bahwa peran auditor internal sangat besar dalam memberikan konsultasi kepada OPD guna menjaga kualitas laporan keuangan yang telah baik, mereka menilai bahwa fungsi konsultatif ini bersifat preventif karena

membantu OPD mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan sejak awal, sehingga kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan akuntabel. Namun, 42,86% (3 responden) berpendapat bahwa tanggung jawab utama atas kualitas laporan keuangan tetap berada pada masing-masing OPD, auditor internal hanya berperan sebagai fasilitator dan pemberi rekomendasi, sementara komitmen, ketelitian, dan kepatuhan OPD menjadi faktor penentu dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dengan beberapa informan serta analisis terhadap data dan dokumen yang ada, diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungbalai, Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pelaksanaan peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masih ditemukan adanya kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi auditor, serta rendahnya kepatuhan OPD dan koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan internal. Hal tersebut disebabkan oleh masih ada Perangkat Daerah yang terlambat dalam menyerahkan laporan keuangannya dikarenakan aset tetap nya yang sangat banyak, masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebagaimana tercermin dari adanya temuan pemeriksaan yang diungkap dalam laporan audit.

Temuan pemeriksaan tidak segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah belum berjalan optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peran Inspektorat sebagai auditor internal masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif.

## **4.2 Pembahasan**

Pembahasan ini dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan laporan keuangan daerah, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

### **4.2.1 Peranan Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Laporan Keuangan**

Inspektorat Kota Tanjung Balai memiliki peranan strategis sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan audit, reviu Melalui kegiatan audit, reviu, monitoring, evaluasi, serta pembinaan kepada perangkat daerah, Inspektorat berperan dalam memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Inspektorat juga berfungsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga potensi kesalahan, penyimpangan, maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat diminimalisir. Dengan demikian, keberadaan Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan daerah.

Peran ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sehingga lebih andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan yang baik adalah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses meraih opini WTP, Inspektorat Kota Tanjung balai berperan sebagai auditor internal yang melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas laporan.

#### **4.2.2 Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai**

Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai pada praktiknya sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kendala. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya temuan berulang dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan permasalahan dalam pengamanan serta pencatatan aset tetap yang belum dilakukan secara tertib dan memadai oleh beberapa perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penatausahaan aset daerah masih menghadapi berbagai kelemahan, baik dalam hal pencatatan administrasi, pengendalian fisik aset, maupun kesesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, munculnya temuan yang bersifat berulang juga mengindikasikan bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait. Situasi tersebut secara tidak langsung mencerminkan bahwa Sistem Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, khususnya melalui optimalisasi peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta mendorong peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut beberapa Peranan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan :

### **1. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Melakukan pembinaan dan evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Inspektorat Kota Tanjungbalai dapat menilai efektivitas pengendalian internal serta mendorong perbaikan terhadap kelemahan pengendalian yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui pelaksanaan audit, revidu, monitoring, dan evaluasi guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Daerah**

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya dalam hal pengamanan dan pencatatan aset tetap, guna mengurangi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Inspektorat Kota Tanjung Balai berperan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah. Selain itu, pembinaan dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pemberian arahan teknis kepada aparatur pengelola keuangan agar mampu memahami dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang benar. Melalui pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, Inspektorat dapat mencegah terjadinya penyimpangan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan daerah.

## **3. Meningkatkan Kualitas Laporan Pengawasan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah**

Peningkatan kualitas laporan pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan keterbatasan kompetensi auditor yang memadai serta koordinasi yang efektif antar perangkat

daerah. Dalam hal ini, Inspektorat memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kompetensi auditor melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan profesionalisme auditor internal. Selain itu, Inspektorat juga berupaya memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan bahwa proses pengawasan serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten serta koordinasi yang baik antar perangkat daerah, diharapkan kualitas laporan pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Inspektorat meng audit laporan keuangan Pemerintah Daerah terlebih dahulu sebelum laporan keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena BPK tidak mau memeriksa Laporan Keuangan yang belum di Audit oleh Inspektorat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung oleh bukti yang memadai. Reviu yang efektif membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung pencapaian opini yang lebih baik.

#### **4. Mencegah dan Menindak Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Inspektorat Kota Tanjung Balai berperan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran preventif dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian

internal, pelaksanaan audit berbasis risiko, serta peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam mendeteksi indikasi kecurangan melalui pemeriksaan khusus dan tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan fungsi pencegahan dan penindakan tersebut, Inspektorat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan peranan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Tanjung Balai memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan daerah. Melalui pengawasan dan pembinaan, melakukan revidi, peningkatan kapasitas SDM, pemberian rekomendasi perbaikan, serta upaya pencegahan dan penindakan kecurangan, Inspektorat mampu memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Mayoritas responden (rata-rata 80%) mendukung bahwa upaya yang dilakukan Inspektorat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, risiko penyimpangan keuangan dapat diminimalisir, sehingga anggaran daerah dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun

Pemerintah Kota Tanjung Balai telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Inspektorat diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian opini tersebut, tetapi juga pada penguatan kualitas tata kelola keuangan secara substansial dan berkelanjutan. Ke depan, Inspektorat perlu terus meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mengoptimalkan fungsi konsultatif dan pendampingan kepada perangkat daerah.. Dengan demikian, capaian WTP tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan. menemukan kelemahan, Inspektorat juga memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap temuan benar-benar diperbaiki, diharapkan melakukan rekonsiliasi setiap bulannya, sehingga terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat yang Dihadapi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara responden dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kota Tanjung Balai menghadapi berbagai hambatan, di antaranya :

##### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam optimalisasi peran Inspektorat Kota

Tanjung Balai sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hambatan ini dapat dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitas auditor yang tersedia. Secara kuantitas, jumlah auditor yang belum sebanding dengan luasnya cakupan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah dapat menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan audit, reviu, dan monitoring. Sementara itu, dari aspek kualitas, perbedaan tingkat kompetensi, pengalaman, serta sertifikasi profesional di bidang audit pemerintahan dapat memengaruhi ketepatan analisis dan kualitas rekomendasi yang diberikan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat. Jumlah auditor yang tersedia seringkali belum sebanding dengan banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus diawasi serta luasnya cakupan kegiatan pemeriksaan yang harus dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja auditor menjadi cukup tinggi sehingga pelaksanaan audit, monitoring, maupun evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh perangkat daerah. Selain itu, keterbatasan jumlah personel juga berpotensi mengurangi intensitas pengawasan serta memperlambat proses tindak lanjut terhadap berbagai temuan pemeriksaan. Inspektorat perlu melakukan berbagai upaya strategis guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengusulkan penambahan jumlah auditor yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keuangan daerah. Selain itu, Inspektorat

juga dapat mengoptimalkan pengelolaan SDM yang ada melalui pembagian tugas yang lebih efektif serta penerapan sistem pengawasan berbasis prioritas atau risiko. Dengan adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pengelolaan yang lebih terstruktur, diharapkan pelaksanaan fungsi pengawasan internal dapat berjalan secara lebih optimal sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## **2. Keterbatasan Kompetensi Auditor**

Rendahnya Keterbatasan kompetensi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Auditor internal dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang memadai terkait dengan standar audit pemerintahan, sistem pengendalian internal, serta pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam praktiknya, tidak semua auditor memiliki tingkat kompetensi yang sama, sehingga hal ini dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan audit, proses identifikasi permasalahan, serta penyusunan rekomendasi yang diberikan kepada perangkat daerah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor menjadi salah satu upaya yang perlu terus dilakukan oleh Inspektorat guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih optimal. Upaya tersebut dapat

dilakukan melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan dan sertifikasi auditor, serta peningkatan pengalaman dalam pelaksanaan audit. Selain itu, penguatan kompetensi auditor juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis terhadap temuan pemeriksaan serta memperkuat rekomendasi yang diberikan kepada perangkat daerah. Dengan adanya auditor yang kompeten dan profesional, diharapkan pengawasan internal dapat berjalan secara lebih efektif sehingga mampu mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

### **3. Rendahnya Kepatuhan OPD dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah**

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa OPD yang belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Inspektorat secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen sebagian perangkat daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel masih perlu ditingkatkan. Selain itu, koordinasi yang belum berjalan secara optimal antar perangkat daerah juga dapat menghambat proses penyampaian informasi serta pelaksanaan tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengawasan, kurangnya komunikasi yang efektif juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi terkait penerapan regulasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan kepatuhan OPD serta memperkuat

koordinasi antar perangkat daerah, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi, forum komunikasi rutin, serta komitmen bersama antar perangkat daerah untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Inspektorat dapat berperan aktif melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi peraturan, serta pemberian pendampingan kepada OPD agar lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi secara berkala antar perangkat daerah juga perlu dilakukan guna memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Dengan adanya peningkatan kepatuhan serta koordinasi yang lebih baik, diharapkan proses pengawasan internal dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Tanjung Balai memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peranan ini meliputi audit berkala, pemberian rekomendasi perbaikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal. Permasalahan mengenai pentingnya pengawasan internal, kualitas laporan keuangan, serta pencapaian tata kelola yang baik menjadi dasar penelitian ini. Penelitian membuktikan bahwa peran audit internal, pembinaan, dan fungsi konsultatif Inspektorat berkontribusi dalam memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kota Tanjung Balai masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan SDM yang kompeten, rendahnya kepatuhan OPD, keterbatasan anggaran, serta intervensi dari pihak berkepentingan menjadi kendala utama yang harus diatasi agar pengawasan terhadap laporan keuangan daerah dapat berjalan optimal, karena jika tantangan-tantangan ini tidak segera ditangani, maka akan sulit bagi Kota Tanjung Balai untuk mempertahankan atau mencapai opini WTP dari BPK, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta alokasi dana dari pemerintah pusat.

Konsep audit internal, akuntabilitas, efektivitas, serta peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menegaskan bahwa pengawasan internal yang sistematis dan berkelanjutan merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini selaras dengan temuan di lapangan, di mana Inspektorat menjalankan fungsi assurance dan consulting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, secara teoritis dan empiris, peran Inspektorat terbukti relevan dalam mendukung terwujudnya prinsip good governance di lingkungan pemerintah daerah.

Pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terhadap auditor Inspektorat memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan internal. Hasil pengumpulan dan analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber menilai peran Inspektorat telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM dan anggaran. Melalui tahapan audit yang sistematis serta upaya pembinaan yang berkelanjutan, Inspektorat mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih akuntabel dan efektif.

## **5.2 Saran**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas SDM, yaitu :
  - a. Mengadakan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi auditor internal agar memiliki kompetensi yang lebih baik dalam melakukan audit dan reuiu

laporan keuangan.

- b. Merekrut tenaga ahli di bidang akuntansi dan audit guna menambah jumlah auditor yang kompeten.

2. Penguatan Regulasi dan Kepatuhan OPD, yaitu :

- a. Menyusun kebijakan yang lebih tegas dalam mewajibkan OPD untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap implementasi sistem akuntansi di setiap OPD.

3. Penambahan Anggaran dan Sarana Pendukung, yaitu :

- a. Meningkatkan alokasi anggaran bagi Inspektorat guna mendukung pengadaan teknologi audit yang lebih modern dan pelaksanaan pelatihan bagi auditor serta aparatur OPD.
- b. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah agar lebih efisien dan transparan.

4. Menjaga Independensi Inspektorat, yaitu :

- a. Memastikan bahwa setiap hasil audit dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun.
- b. Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan audit dengan membuka akses informasi kepada masyarakat.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan Inspektorat Kota Tanjung Balai dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan secara signifikan dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2022). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Buku 1 Edisi*.
- Ahmad, H., Farinal, P. R., Sari, R., Lannai, D., & Abduh, M. (2024). Pengaruh Pengalaman Auditor, Tekanan Anggaran Waktu, dan Independensi Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Soppeng. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(3), 310–322.
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96.
- Gendong, A. E., Tameno, N., & de Rozari, P. E. (n.d.). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai*.
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: Pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance. *Jurnal Economina*, 2(6), 1318–1330.
- Hariadi, B. W., & Slamet, P. H. (2020). Analisis Perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko Pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(1).
- Hery, S. E. M. S. C. R. P. R. S. A. C. (2019). *Auditing: Dasar - Dasar Pemeriksaan Akutansi*. <https://books.google.co.id/books?id=F8WZDwAAQB AJ>
- Ibrahim, I. H., Haliah, H., & Habbe, A. H. (2023). Pengaruh Tekanan Waktu, Konflik Peran dan Integritas terhadap Kualitas Audit dengan Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 102–122.
- Istiqomah, N., Badar, M., & Wahid, A. (2022). Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. *KAIZEN: Kajian Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Kewirausahaan*, 1(2), 1–7.
- Kurniawan, L., Warman, K., & Fendri, A. (2023). Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 484–496.
- Lakoro, F. S. (2024). Analisis Kualitas Audit Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 392–404.

- Mailangkay, J., & Nugrahanti, T. P. (2024). Audit Review Artikel Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit: Kualitas Audit. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 2(1).
- Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 276–280.
- Pratama, M. A. A. P., Rafdi, H., & Patty, A. N. (2024). Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023). *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 3(4), 40–49.
- Rahman, K. G. (2020). Sistem pengendalian internal dan peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 3(1), 20–27.
- Rialdy, N., Sari, M., Hani, S., Jufrizen, J., & Irfan, I. (2023). Internal Auditor Professionalism: Determinants and Its Effect on Behavior Auditor Ethics. *Integrated Journal of Business and Economics*, 7(3), 518–532.
- Saniya, T., Yulianasari, N., & Herawati, H. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 828–837.
- Sipayung, Y. A. I., & Morasa, J. (2021). Evaluasi Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Tomohon). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 871–879.
- Siregar, R. A., Astuty, W., & Sari, M. (2019). Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisme Profesional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kualitas Audit pada BPKP Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(2), 23–35.
- Sunarsih, N. M., Munidewi, I. A. B., & Masdiari, N. K. M. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas audit, opini audit, komite audit terhadap audit report lag. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 1–13.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit internal : Konsep dan praktik*. Jakarta : Salemba